

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Daerah Kabupaten Nagan Raya

Bulan Januari 2025 (Berdasarkan IPH)

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Nagan Raya pada Januari 2025, tercatat tren kenaikan harga yang relatif **bertahap dan terkendali**, dengan rincian sebagai berikut:

- **M1 : 3,08%**
- **M2 : 3,34%**
- **M3 : 3,41%**
- **M4 : Tidak dirilis**
- **M5 : 3,65%**

Kenaikan IPH dari M1 hingga M5 menunjukkan bahwa tekanan harga **semakin meningkat seiring meluasnya cakupan komoditas**, baik barang kebutuhan pokok, barang lainnya, maupun jasa. Nilai IPH tertinggi pada M5 mengindikasikan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada kelompok pangan utama, tetapi juga mulai merambah ke komoditas non-pangan dan jasa.

□ Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

Harga barang kebutuhan pokok dan penting pada Januari 2025 menunjukkan **kecenderungan meningkat**, terutama pada komoditas pangan strategis seperti:

- Beras
- Cabai dan bawang

Minyak goreng

- Telur dan gula pasir

Kenaikan harga komoditas tersebut dipengaruhi oleh:

- Ketergantungan pasokan dari luar daerah
- Faktor musiman dan cuaca
- Distribusi yang belum sepenuhnya efisien

Meskipun demikian, berbagai upaya stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah daerah mampu menahan lonjakan harga agar tetap dalam batas yang terkendali.

□ Perkembangan Harga Barang Lainnya

Kelompok barang lainnya (non-pangan) turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPH, antara lain:

- Barang kebutuhan rumah tangga
- Bahan bangunan tertentu
- Produk konsumsi harian

Kenaikan harga pada kelompok ini umumnya dipengaruhi oleh **kenaikan biaya distribusi dan biaya input**, termasuk harga energi dan transportasi.

□ Perkembangan Harga Jasa

Harga jasa pada Januari 2025 relatif stabil, namun mulai menunjukkan tekanan kenaikan, khususnya pada:

- Jasa transportasi
-

Jasa perawatan dan layanan rumah tangga

- Jasa pendidikan dan sosial tertentu

Peningkatan ini mencerminkan adanya **cost-push inflation**, di mana kenaikan biaya operasional mendorong penyesuaian tarif jasa.

□ Risiko Inflasi ke Depan

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:

1. **Volatilitas Harga Pangan**

Gangguan cuaca dan ketidakpastian pasokan berpotensi memicu lonjakan harga pangan segar.

2. **Ketergantungan Pasokan Luar Daerah**

Keterbatasan produksi lokal menyebabkan harga di daerah rentan terhadap gejolak eksternal.

3. **Tekanan Biaya Distribusi dan Energi**

Kenaikan biaya transportasi dan logistik dapat mendorong peningkatan harga barang dan jasa.

4. **Peningkatan Permintaan Musiman**

Menjelang hari besar keagamaan, permintaan cenderung meningkat dan berpotensi menekan harga.

5. **Daya Beli Masyarakat**

Jika kenaikan harga tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat berisiko menurun.

Kesimpulan

Perkembangan IPH Kabupaten Nagan Raya pada Januari 2025 menunjukkan **inflasi daerah dalam kondisi terkendali namun perlu diwaspadai**. Tekanan harga terutama berasal dari kelompok pangan dan mulai meluas ke barang non-pangan dan jasa. Ke depan, diperlukan penguatan pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan, efisiensi distribusi, serta penguatan koordinasi TPID agar inflasi tetap terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi

2. Perkembangan Inflasi Daerah Kabupaten Nagan Raya

Bulan Februari 2025 (Berdasarkan IPH)

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Nagan Raya pada Februari 2025, tercatat **perlambatan tekanan harga** bahkan kecenderungan **penurunan harga (deflasi)** pada cakupan komoditas yang lebih luas, dengan rincian sebagai berikut:

- **M1 : 0,43%**
- **M2 : 0,23%**
- **M3 : -0,69%**
- **M4 : -1,03%**

Pergerakan IPH dari M1 dan M2 yang masih positif, kemudian berubah negatif pada M3 dan M4, menunjukkan bahwa **harga barang kebutuhan utama relatif stabil**, sementara **harga komoditas yang lebih luas mulai mengalami penurunan**. Hal ini mengindikasikan melemahnya tekanan inflasi dibanding bulan sebelumnya.

▣ Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

Pada Februari 2025, harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Nagan Raya cenderung **lebih stabil** dibanding Januari 2025, bahkan sebagian mengalami penurunan, khususnya:

- Cabai dan bawang
- Sayuran segar
- Ikan segar

Stabilitas dan penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh:

- Membaiknya pasokan hasil pertanian dan perikanan

- Normalisasi distribusi pasca awal tahun
- Berkurangnya tekanan permintaan musiman

Namun demikian, beberapa komoditas seperti beras dan minyak goreng masih menunjukkan harga relatif stabil dengan potensi fluktuasi terbatas.

▣ **Perkembangan Harga Barang Lainnya**

Kelompok barang lainnya (non-pangan) pada Februari 2025 secara umum mengalami:

- **Penurunan harga ringan** atau stagnasi
- Minim tekanan dari sisi permintaan

Hal ini sejalan dengan IPH M3 dan M4 yang negatif, mencerminkan:

- Penyesuaian harga pasca kenaikan sebelumnya
 - Daya beli masyarakat yang cenderung berhati-hati
-

▣ **Perkembangan Harga Jasa**

Harga jasa pada Februari 2025 relatif:

- **Stabil**, bahkan cenderung tidak mengalami kenaikan signifikan
- Beberapa jasa transportasi dan layanan rumah tangga menunjukkan penyesuaian tarif terbatas

Kondisi ini turut berkontribusi terhadap menurunnya tekanan inflasi pada indeks yang lebih luas.

▣ **Risiko Inflasi ke Depan**

Meskipun pada Februari 2025 tekanan inflasi melemah, beberapa risiko tetap perlu diantisipasi:

1. **Potensi Rebound Inflasi Pangan**

Perubahan cuaca, gangguan pasokan, atau distribusi dapat kembali mendorong kenaikan harga pangan segar.

2. **Peningkatan Permintaan Menjelang Hari Besar Keagamaan**

Permintaan konsumsi berpotensi meningkat dan menekan harga pada bulan-bulan berikutnya.

3. **Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah**

Masih menjadi faktor kerentanan terhadap gejolak harga eksternal.

4. **Tekanan Biaya Energi dan Transportasi**

Kenaikan biaya ini berpotensi mendorong penyesuaian harga barang dan jasa.

5. **Daya Beli Masyarakat**

Deflasi yang terlalu dalam juga mencerminkan lemahnya permintaan, yang perlu diwaspadai agar tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Kesimpulan

Perkembangan IPH Kabupaten Nagan Raya pada Februari 2025 menunjukkan **inflasi daerah dalam kondisi sangat terkendali dengan kecenderungan deflasi**, terutama pada cakupan komoditas yang lebih luas. Stabilitas ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi secara preventif, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Perkembangan Inflasi Daerah Kabupaten Nagan Raya

Bulan Maret 2025 (Berdasarkan IPH)

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Nagan Raya pada Maret 2025, tercatat **penurunan harga yang cukup dalam (deflasi)** dan semakin meluas pada berbagai kelompok komoditas, dengan rincian sebagai berikut:

- **M1 : -0,96%**

- **M2 : -1,28%**

- **M3 : -1,54%**
- **M4 : Tidak dirilis**

Pergerakan IPH yang seluruhnya bernilai negatif dan semakin besar dari M1 ke M3 menunjukkan bahwa **penurunan harga terjadi secara merata**, baik pada barang kebutuhan pokok, barang lainnya, maupun mulai merambah ke sektor jasa. Tekanan inflasi daerah pada bulan ini relatif sangat rendah dibanding bulan sebelumnya.

▣ **Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting**

Harga barang kebutuhan pokok dan penting pada Maret 2025 mengalami **penurunan signifikan**, terutama pada komoditas pangan segar seperti:

- Cabai dan bawang
- Sayuran dan ikan segar
- Komoditas hasil pertanian musiman

Penurunan harga dipengaruhi oleh:

- Meningkatnya pasokan hasil panen dan tangkapan
- Distribusi yang lebih lancar
- Belum meningkatnya permintaan konsumsi secara signifikan

Sementara itu, harga beras dan minyak goreng relatif stabil, meskipun berada dalam tren penyesuaian ringan.

▣ **Perkembangan Harga Barang Lainnya**

Kelompok barang non-pangan juga mengalami **koreksi harga**, antara lain:

Barang kebutuhan rumah tangga

- Produk konsumsi sekunder

Kondisi ini mencerminkan:

- Penyesuaian harga pasca kenaikan pada bulan-bulan sebelumnya
 - Melemahnya permintaan masyarakat
-

▣ **Perkembangan Harga Jasa**

Harga jasa pada Maret 2025 secara umum:

- Relatif stabil hingga cenderung menurun ringan
- Minim penyesuaian tarif baru

Hal ini sejalan dengan menurunnya aktivitas ekonomi musiman dan kehati-hatian pelaku usaha dalam menaikkan tarif jasa.

▣ **Risiko Inflasi ke Depan**

Meskipun inflasi pada Maret 2025 berada pada kondisi deflasi, terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi ke depan:

1. **Potensi Pembalikan Arah Inflasi (Rebound)**

Penurunan harga yang dalam dapat diikuti kenaikan tajam ketika pasokan terganggu atau permintaan meningkat.

2. **Lonjakan Permintaan Menjelang Hari Besar Keagamaan**

Kebutuhan konsumsi masyarakat berpotensi meningkat dan mendorong kenaikan harga pangan.

3. **Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah**

Masih menjadi sumber risiko jika terjadi gangguan distribusi.

-

Tekanan Biaya Produksi dan Distribusi

4.

Kenaikan biaya energi, pupuk, dan transportasi dapat kembali mendorong harga naik.

5. **Risiko Pelemahan Aktivitas Ekonomi**

Deflasi berkepanjangan dapat menekan pendapatan pelaku usaha dan petani.

Kesimpulan

Perkembangan IPH Kabupaten Nagan Raya pada Maret 2025 menunjukkan **deflasi yang cukup dalam dan meluas**, terutama pada kelompok pangan dan barang konsumsi lainnya. Kondisi ini memberikan sinyal perlunya kebijakan pengendalian inflasi yang **seimbang**, tidak hanya menahan kenaikan harga, tetapi juga menjaga agar deflasi tidak berlarut dan melemahkan perekonomian daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Daerah

1. Ketergantungan Pasokan Pangan dari Luar Daerah

Sebagian komoditas pangan strategis (beras kualitas tertentu, bawang merah, cabai, gula, minyak goreng) masih bergantung pada pasokan dari luar kabupaten/provinsi.

➔ Dampaknya: ketika terjadi gangguan distribusi, cuaca ekstrem, atau kenaikan harga di daerah pemasok, harga di daerah ikut naik dan sulit dikendalikan.

2. Volatilitas Harga Pangan Segar

Komoditas hortikultura seperti cabai, bawang, ikan segar, dan sayuran sangat dipengaruhi:

- Musim tanam/panen
- Cuaca dan bencana alam
- Keterbatasan penyimpanan (*cold storage*)

➔ Akibatnya harga berfluktuasi tajam dan sering menjadi penyumbang utama inflasi bulanan.

3. Distribusi dan Logistik Belum Efisien

Masalah yang masih dijumpai:

- Infrastruktur jalan dan transportasi yang belum optimal
 - Biaya distribusi tinggi dari sentra produksi ke pasar
 - Rantai distribusi panjang (banyak perantara)
- ➔ Harga di tingkat konsumen meningkat meskipun harga di produsen relatif stabil.
-

4. Keterbatasan Produksi Lokal dan Hilirisasi

Produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan sepanjang tahun dan masih minim pengolahan pascapanen.

➔ Saat produksi lokal menurun, daerah tidak punya *buffer* yang cukup untuk menahan kenaikan harga.

5. Lemahnya Sistem Informasi dan Early Warning Harga

- Pemantauan harga belum sepenuhnya *real time*
 - Keterbatasan data stok dan pasokan harian
 - Koordinasi lintas OPD dan pelaku usaha belum optimal
- ➔ Pemerintah daerah sering bersifat reaktif, bukan preventif, dalam pengendalian inflasi.
-

6. Perilaku Pasar dan Spekulasi

Menjelang hari besar keagamaan atau momen tertentu:

- Terjadi penahanan stok
- Perilaku spekulatif pedagang

Kenaikan permintaan musiman

➔ Harga naik cepat meskipun pasokan relatif cukup.

7. Keterbatasan Anggaran dan Skala Intervensi

Program pengendalian seperti:

- Operasi pasar
- Pasar murah
- Subsidi transportasi

sering terkendala:

- Anggaran terbatas
 - Jangkauan wilayah yang belum merata
 - Dampak yang bersifat jangka pendek
-

8. Tekanan Biaya Non-Pangan

Kenaikan harga:

- BBM dan energi
- Tarif transportasi
- Jasa tertentu

➔ Mendorong kenaikan harga barang lain (*cost-push inflation*), terutama pada indeks harga yang lebih luas.

9. Daya Beli Masyarakat yang Rentan

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah sangat sensitif terhadap kenaikan harga pangan.

➔ Sedikit kenaikan harga sudah berdampak besar pada kesejahteraan dan konsumsi rumah tangga.

Kesimpulan Singkat

Permasalahan utama pengendalian inflasi daerah bukan hanya pada **harga**, tetapi juga pada **struktur pasokan, distribusi, produksi lokal, dan koordinasi kebijakan**. Tanpa penguatan dari sisi hulu hingga hilir, inflasi akan terus berulang terutama pada komoditas pangan strategis.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan secara **terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan** melalui sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat, dengan mengacu pada arahan pemerintah pusat serta kondisi spesifik daerah.

1. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi TPID

Pemerintah daerah mengoptimalkan peran **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** melalui:

- Rapat koordinasi rutin dan insidental
- Sinkronisasi kebijakan lintas OPD
- Penyusunan rencana aksi pengendalian inflasi daerah

➔ TPID berfungsi sebagai pusat koordinasi perumusan kebijakan, pengambilan keputusan cepat, dan monitoring inflasi daerah.

2. Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pasokan

Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui:

- Pemantauan harga harian dan mingguan di pasar tradisional
- Monitoring ketersediaan stok komoditas strategis
- Pelaporan berkala kepada pimpinan daerah dan pemerintah pusat

➔ Tujuannya untuk mendeteksi dini potensi gejolak harga (*early warning system*).

3. Stabilisasi Harga Pangan Strategis

Kebijakan stabilisasi harga dilaksanakan dengan:

- Operasi pasar dan pasar pangan murah
- Penyaluran cadangan pangan pemerintah
- Kerja sama antar daerah (*KAD*) dalam pemenuhan pasokan

➔ Fokus utama pada komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, gula, dan telur.

4. Penguatan Produksi dan Ketahanan Pangan Lokal

Pemerintah daerah mendorong peningkatan produksi lokal melalui:

- Bantuan sarana dan prasarana pertanian
- Pengembangan sentra produksi pangan
- Pendampingan petani dan nelayan

➔ Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dan menekan risiko inflasi jangka menengah-panjang.

5. Kelancaran Distribusi dan Logistik

Kebijakan diarahkan pada:

- Pengamanan distribusi barang kebutuhan pokok
- Pengurangan hambatan transportasi dan biaya logistik
- Pengawasan kelancaran pasokan hingga ke tingkat pasar

➔ Distribusi yang lancar membantu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

6. Pengendalian Ekspektasi dan Komunikasi Publik

Pelaksanaan kebijakan juga mencakup:

- Publikasi perkembangan harga dan inflasi daerah
- Imbauan belanja bijak kepada masyarakat
- Edukasi pelaku usaha untuk menjaga stabilitas harga

➔ Komunikasi yang efektif mencegah kepanikan dan perilaku spekulatif.

7. Pengawasan dan Penegakan Aturan

Pemerintah daerah bersama aparat terkait melakukan:

- Pengawasan distribusi dan harga
- Pencegahan penimbunan barang
- Penegakan ketentuan perdagangan sesuai regulasi

➔ Langkah ini untuk menjaga keadilan pasar dan mencegah distorsi harga.

8. Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan pengendalian inflasi dilengkapi dengan:

- Bantuan sosial tepat sasaran
- Subsidi atau intervensi harga terbatas
- Dukungan kepada kelompok rentan

→ Tujuannya menjaga daya beli dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

Penutup

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah menekankan keseimbangan antara **pengendalian jangka pendek (stabilisasi harga)** dan **penguatan struktural jangka menengah-panjang (produksi dan distribusi)**. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh **konsistensi pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan**.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah dilakukan untuk menilai **efektivitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan kebijakan**, serta mengidentifikasi area perbaikan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

1. Capaian Stabilitas Inflasi Daerah

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi telah mampu:

- Menahan laju inflasi daerah agar tetap dalam rentang terkendali
- Meredam lonjakan harga pada periode tertentu melalui intervensi pasar

Namun demikian, stabilitas tersebut masih **bersifat fluktuatif**, terutama pada komoditas

pangan strategis yang rentan terhadap faktor musiman dan pasokan.

2. Efektivitas Program Stabilisasi Harga

Program seperti:

- Operasi pasar
- Pasar pangan murah
- Penyaluran cadangan pangan

terbukti efektif **dalam jangka pendek** untuk menekan harga dan meredam gejolak pasar.
➔ Kelemahannya, dampak program belum berkelanjutan dan jangkauan wilayah masih terbatas.

3. Kinerja Koordinasi TPID

Koordinasi lintas OPD dan instansi terkait menunjukkan:

- Peningkatan intensitas rapat dan respons kebijakan
- Keputusan yang lebih cepat saat terjadi lonjakan harga

Namun:

- Sinkronisasi perencanaan antar OPD masih perlu diperkuat
 - Tindak lanjut hasil rapat TPID belum sepenuhnya terukur secara kinerja.
-

4. Penguatan Produksi dan Pasokan Lokal

Upaya peningkatan produksi lokal sudah berjalan melalui bantuan sarana pertanian dan dukungan petani.

➔ Evaluasi menunjukkan:

- Produksi lokal belum mampu menjadi penyangga utama stabilitas harga

- Hilirisasi dan pengelolaan pascapanen masih terbatas

Sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah masih tinggi.

5. Distribusi dan Logistik

Kebijakan pengendalian inflasi melalui kelancaran distribusi menunjukkan hasil yang **cukup positif**, namun:

- Biaya logistik masih relatif tinggi
- Infrastruktur pendukung distribusi belum optimal di seluruh wilayah

Hal ini mempengaruhi disparitas harga antar pasar dan wilayah.

6. Sistem Pemantauan dan Data Harga

Pemantauan harga sudah dilakukan secara rutin, tetapi:

- Belum sepenuhnya *real time*
- Integrasi data antar OPD dan instansi vertikal masih terbatas

➡ Akibatnya, kebijakan sering bersifat reaktif, bukan preventif.

7. Pengendalian Ekspektasi dan Perilaku Pasar

Komunikasi publik terkait harga dan inflasi sudah dilakukan, namun:

- Informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Perilaku spekulatif dan lonjakan permintaan musiman masih terjadi

Perlu penguatan strategi komunikasi yang lebih masif dan konsisten.

8. Dampak terhadap Daya Beli Masyarakat

Kebijakan pengendalian inflasi berkontribusi menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Namun:

- Dampak kenaikan harga pangan masih dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah
 - Bantuan sosial perlu lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
-

□ Kesimpulan Evaluatif

Kebijakan pengendalian inflasi di daerah **cukup efektif dalam jangka pendek**, terutama melalui intervensi harga dan koordinasi TPID. Namun, efektivitas **jangka menengah dan panjang** masih perlu diperkuat melalui:

- Penguatan produksi dan ketahanan pangan lokal
 - Perbaikan sistem data dan *early warning*
 - Integrasi kebijakan pengendalian inflasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah
-

Rekomendasi Singkat

1. Menggeser fokus dari kebijakan reaktif ke preventif.
2. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi hulu (produksi dan pasokan).
3. Meningkatkan kualitas data harga dan stok secara *real time*.
4. Memperluas cakupan dan keberlanjutan program stabilisasi harga.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Rekomendasi kebijakan diarahkan untuk memperkuat **pengendalian inflasi jangka pendek**, sekaligus membangun **ketahanan struktural jangka menengah dan panjang** agar stabilitas harga dapat terjaga secara berkelanjutan.

1. Penguatan Pengendalian Inflasi dari Hulu (Produksi)

- Mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui bantuan sarana produksi, bibit unggul, dan pendampingan petani.
- Mengembangkan sentra produksi komoditas penyumbang inflasi utama.
- Memperkuat pengelolaan pascapanen (gudang, *cold storage*, pengering).

➔ Tujuan: mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

2. Stabilisasi Harga Pangan Strategis Berbasis Data

- Menetapkan komoditas prioritas pengendalian inflasi daerah.
- Melakukan operasi pasar secara **tepat waktu dan tepat lokasi** berdasarkan tren harga.
- Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah daerah.

➔ Tujuan: intervensi lebih efektif dan efisien.

3. Peningkatan Efisiensi Distribusi dan Logistik

- Menyederhanakan rantai distribusi pangan.
- Mendorong kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan.
- Memberikan dukungan transportasi/logistik pada wilayah dengan disparitas harga

tinggi.

➔ Tujuan: menurunkan biaya distribusi dan disparitas harga antar wilayah.

4. Penguatan Sistem Pemantauan dan Early Warning

- Mengembangkan sistem pemantauan harga dan stok berbasis digital dan *real time*.
- Integrasi data lintas OPD dan instansi vertikal.
- Menetapkan ambang batas harga sebagai sinyal intervensi dini.

➔ Tujuan: mencegah lonjakan harga sebelum terjadi.

5. Optimalisasi Peran TPID dan Penganggaran

- Memperjelas pembagian peran dan target kinerja TPID.
- Mengintegrasikan program pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- Memastikan keberlanjutan pendanaan program strategis.

➔ Tujuan: pengendalian inflasi menjadi agenda prioritas daerah.

6. Pengendalian Ekspektasi dan Komunikasi Publik

- Menyampaikan informasi harga secara transparan dan berkala.
- Edukasi masyarakat terkait pola konsumsi bijak.
- Membangun komunikasi aktif dengan pelaku usaha dan pedagang.

➔ Tujuan: menekan perilaku spekulatif dan kepanikan pasar.

7. Pengawasan dan Penegakan Aturan Pasar

- Meningkatkan pengawasan distribusi dan stok barang kebutuhan pokok.
- Menindak praktik penimbunan dan permainan harga.
- Memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum.

➔ Tujuan: menjaga keadilan dan keteraturan pasar.

8. Perlindungan Daya Beli Masyarakat Rentan

- Menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran dan tepat waktu.
- Mengembangkan subsidi bersifat sementara dan terukur.
- Memprioritaskan kelompok berpendapatan rendah saat terjadi lonjakan harga.

➔ Tujuan: menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

□ Penutup

Pengendalian inflasi daerah memerlukan **kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan berkelanjutan**. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama agar inflasi tetap terkendali sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.